

SKRIPSI
POLITIK ANGGARAN: RELASI AKTOR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SIDRAP TAHUN 2022



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

DISUSUN OLEH:

MUH. HAMKA

E041181307

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**POLITIK ANGGARAN: RELASI AKTOR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SIDRAP TAHUN 2022**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

DISUSUN OLEH:

MUH. HAMKA

E041181307

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

POLITIK ANGGARAN: RELASI AKTOR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SIDRAP TAHUN 2022

Disusun dan Diajukan Oleh :

MUH. HAMKA

E041181307

Telah dipertahankan di hadapan panitia penguji ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal 13 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

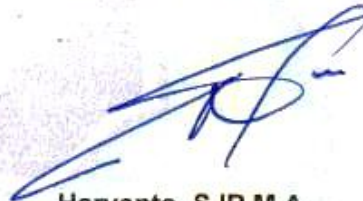
Pembimbing Utama



Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.SI

NIP. 1979123 200812 2 002

Pembimbing Pendamping



Haryanto, S.IP,M.A

NIP. 19861008 201903 1 009

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs/ Andi Yakub. M.Si..Ph.D.

NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

POLITIK ANGGARAN: RELASI AKTOR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SIDRAP TAHUN 2022

Disusun dan Diajukan Oleh :

MUH. HAMKA

E041181307

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada
Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si

(.....)

Sekretaris : Haryanto, S.IP, M.A.

(.....)

Anggota : Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si.

(.....)

Anggota : Dr. Muh. Imran, S.IP, M.Si.

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. HAMKA
NIM : E041181307
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Politik Anggaran: Relasi Aktor Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2022" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Juli 2022



(MUH. HAMKA)

ABSTRAK

Muh. Hamka. Nim E041181307. Politik Anggaran: Relasi Aktor Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2022. Dimbing Oleh Sakinah Nadir Dan Haryanto.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk kebijakan publik di bidang penganggaran publik untuk membiayai program kerja pemerintah daerah demi mencapai kesejahteraan rakyat. proses penyusunan anggaran daerah melibatkan beberapa aktor yang memiliki kepentingan terhadap APBD. Hubungan setiap aktor membentuk jaringan secara terstruktur dan sistematis serta aktor mengatur strategi demi terakomodasi kepentingannya terhadap APBD. Sehingga studi ini fokus pada kajian relasi aktor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktor utama yang mendominasi proses penyusunan APBD, bagaimana aktor dalam membentuk jaringan dan strategi aktor dalam memasukan serta mengawal kepentingannya terhadap APBD kabupaten Sidrap tahun 2022.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deskripsi analisis untuk menggambarkan relasi setiap aktor dengan menggunakan teori jaringan aktor kebijakan publik dari Wellman. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang terlibat langsung dan memahami proses penyusunan anggaran daerah di Kabupaten Sidrap, observasi partisipasi dilakukan oleh penulis dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati proses penyusunan anggaran daerah, dan studi kepustakaan sebagai data sekunder dengan merujuk pada berita, artikel, jurnal, dan buku.

Hasil penelitian ini menyatakan aktor yang terlibat dalam penyusunan anggaran daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu aktor formal dan aktor informal. Aktor utama yang mendominasi penyusunan anggaran daerah adalah kepala daerah sebagai pemegang keputusan tertinggi dan anak bupati sebagai aktor informal yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan. Setiap aktor membentuk jaringan untuk mengakomodasi kepentingannya terhadap APBD dengan memperkuat relasinya dengan pemegang keputusan tertinggi dalam penganggaran daerah. Strategi aktor dalam memasukan dan mengawal kepentingannya terhadap APBD menggunakan empat kerangka strategi politik dari Roberts yaitu strategi posisi, strategi kekuasaan, strategi pemain, dan strategi persepsi.

Kata Kunci: Anggaran, Aktor, Relasi, Strategi, Kepentingan

ABSTRACT

Muh. Hamka Nim E041181307. Budget Politics: Actor Relations in the Preparation of the Sidrap Regency Regional Revenue and Expenditure Budget in 2022. Guided by Sakinah Nadir and Haryanto.

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) is a product of public policy in the field of public budgeting to finance local government work programs in order to achieve people's welfare. the process of preparing regional budgets involves several actors who have an interest in the APBD. The relationship between each actor forms a structured and systematic network and arranges strategies to accommodate the interests of actors in the APBD. So this study focuses on the study of actor relations. The purpose of this study is to find out the main actors who dominate the APBD preparation process, how actors form networks and actors' strategies in entering and guarding their interests in the Sidrap Regency APBD in 2022.

The type of research used is qualitative with descriptive analysis type to describe the relationship of each actor by using the theory of public policy actor network from Wellman. The data collection techniques used were in-depth interviews with several informants who were directly involved and understood the process of preparing the regional budget in Sidrap Regency, participatory observation was carried out by the author by going to the research location to directly observe the process of preparing the regional budget, and literature study as secondary data by referring to news, articles, journals, and books.

The results of this study are, the actors involved in the preparation of regional budgets are grouped into two, namely formal actors and informal actors. The main actors who dominate the preparation of regional budgets are the regional head as the highest decision holder and the regent's son as an informal actor who has influence in decision making. Each actor forms a network to accommodate their interests in the APBD by strengthening their relationship with the highest decision holders in regional budgeting. The strategy of actors in entering and guarding their interests in the APBD uses four political strategy frameworks from Roberts, namely position strategy, power strategy, player strategy, and perception strategy.

Keywords: Budget, Actors, Relationships, Strategy, Interests

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *rabbilalamin* Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala keberkahan, karuniah serta nikmat kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“POLITIK ANGGARAN: RELASI AKTOR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA”**. Shalawat dan salam juga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mulia, yang menjadi suri tauladan dalam penyelesaian skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat dan diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat sebagai mahasiswa sarjana (S1), untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan tantangan, namun berkat segala bantuan dan doa dari semua pihak yang menyertai perjalanan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dalam pendahuluan ini, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali.

Selain itu terimakasih yang setinggi-tingginya penulis tujukan kepada kedua orang tua penulis, **MUH.YUSUF** dan **JUMAATI** yang telah memberikan kasih sayang yang begitu tulus. Dua orang malaikat gagah dan cantik yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moral dan material yang tak lupa diiringi doa di setiap sujudnya. Semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kedua orang tua dan juga kepada semua keluarga besar penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada **Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.Ip., M.Si** selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak **Haryanto, S.Ip., M.Si** selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Serta semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. penulis menyadari bahwa banyak hambatan yang dialami, namun berkat bimbingan dan dorongan dari dosen pembimbing dan pihak-pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menggunakan judul dalam penyusunan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si, Dr. Suparman Abdullah, M.Si** dan **Dr.Hasrullah, M.Si** selaku Wakil Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik serta kemahasiswaan.
4. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.

5. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : **Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus M.Si, Bapak Dr. Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Ibu Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, Bapak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Ibu Dian Ekawati, S.IP, M.Si** yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Kepada keluarga besar **Himapol FISIP Unhas** yang telah menjadi wadah pembelajaran di luar perkuliahan, dan telah berkontribusi besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah. Himapolku, Himapolmu, Himapol Kita Semua.
8. Terima kasih untuk **IPMI SIDRAP CABANG TELLU LIMPOE** telah menjadi nyaman-nyamannya.
9. Kepada saudara saudariku saya keluarga asrama tellu limpoe (ASTEL) **Mamnum Aulia, Multi Nurul Ainum, Andi Haris, Munsyir, Ikhsan, Exel, Jumadi, Neni, Dian Anugrah, Rina Safitri** telah mengajarkan arti persaudaraan sesungguhnya.
10. Kepada teman-teman **Ilmu Politik 2018** yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
11. Kepada saudara saudariku **Revolusi 18**. Terima kasih telah menjadi saudara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.
12. Kepada teman-teman **PRISMA FISIP UNHAS** Terima kasih telah menjadi saudara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu

Politik Fisip Unhas.

13. Terima kasih untuk **KKN Tematik Unhas Gel. 106 Sidrap 1**. Atas canda tawa, semangat dan kerja samanya sejak 28 Juni 2021 hingga detik ini.
14. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada **H. Ruslan, Dr. Nasaruddin Waris M.Si, Sunandar Priyoatmojo, SE., AK, Rida Bakri, Syahrul Anwar, Dan Andi Haris** sebagai narasumber yang telah ikhlas memberikan informasi kepada penulis
15. Terima kasih kepada Bidang Perencanaan Anggaran telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa bergabung selama 55 hari dalam kegiatan magang untuk keperluan penelitian penulis, terutama **Kak Arman, Kak Ade, Dan Kak Firna** telah menjadi sahabat bagi penulis dalam keseharian selama ikut magang.
16. Kepada terkasih A yang selalu ada memotivasi dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini, saya ucapkan banyak terimakasih
17. Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini sampai selesai yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Selebihnya terimakasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu persatu. Sesungguhnya Kalian tetap teringat sebagai sejarah dalam menulis menjadi mahasiswa. Akhirnya penulis menyadari atas segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 11 Juni 2022

MUH. HAMKA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRAC.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	.xvi
DAFTAR TABEL.....	.xvii
DAFTAR LAMPIRANxviii
BAB 1 PENDAHULUAN1
1.1. Latar Belakang.....	..1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14

2.1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dalam Perspektif Politik Anggaran	14
2.2. Jaringan Aktor Perumusan Kebijakan Publik	17
2.3. Penelitian Terdahulu (<i>Literatur Review</i>)	28
2.4. Kerangka Pikir	31
2.5. Skema Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Tipe dan Jenis Penelitian	34
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.3. Jenis dan Sumber Data	35
3.3.1. Data Primer	35
3.3.2. Data Sekunder	36
3.4. Teknik Pengumpulan Data	36
3.4.1. Wawancara Mendalam	36
3.4.2. Observasi Partisipatif	38
3.4.3. Studi Kepustakaan	38
3.5. Teknik Analisis Data	38
3.6. Penarikan Kesimpulan	39

BAB IV Gambaran Umum	40
4.1. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah	40
4.1.1 Kondisi Geografis Dan Demografi Kabupaten Sidrap.....	40
4.1.2 Permasalahan Pembangunan Daerah	42
4.1.3 Isu Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang	43
4.2. Kebijakan Keuangan Daerah Dan Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Sidrap 2022	47
4.2.1 Kebijakan Keuangan Daerah	47
4.2.2. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	51
4.3. Lembaga Eksekutif Dan Lembaga Legislatif Kabupaten Sidrap	54
BAB V Pembahasan dan Hasil Penelitian	58
5.1. Aktor dalam penyusunan APBD Kabupaten Sidrap	58
5.1.1. Aktor formal	60
5.1.2. Aktor Informal	65
5.2. Jaringan Aktor Dalam Penyusunan APBD Kabupaten Sidrap Tahun 2022	69
5.3. Strategi Aktor Dalam Memasukan Dan Mengawal Kepentingannya Terhadap APBD	78
BAB VI Penutup	84

6.1. Kesimpulan.....	84
6.2. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema penelitian relasi jaringan aktor dalam APBD kab. sidrap 2022.....	.33
Gambar 5.1. Skema relasi aktor dalam penyusunan APBD tahun 2022..	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Ringkasan perubahan APBD pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran 2021	9
Tabel 3.1. daftar infroman	37
Tabel 4.1. Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2022	50
Tabel 4.2. komposisi anggota DPRD kabupaten Sidrap dalam 2 periode terakhir	55
Tabel 5.1. aktor dalam kebijakan publik	68

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi 1. Nasaruddin Waris M.Si (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidrap)	91
Dokumentasi 2. Sunandar Priyoatmojo, SE., AK	91
Dokumentasi 3. Ruslan (ketua DPRD kabupaten Sidrap) dan Muh. Ridah Bakri (Anggota DPRD fraksi Gerindra).....	92
Dokumentasi 4. Sahrul Anwar (Mahasiswa).....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang politik anggaran terkait dengan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang melibatkan beberapa aktor dan kepentingan di dalamnya. Persoalan kunci yang diteliti adalah mengkaji siapa aktor politik yang mendominasi penyusunan anggaran daerah, bagaimana pembentukan jaringan aktor dan strategi setiap aktor dalam memasukan dan mengawal kepentingannya. Untuk memahami proses tersebut penelitian ini menggunakan teori jaringan. Asumsi dasar teori jaringan adalah setiap aktor (individu atau kolektif) mempunyai akses berbeda terhadap sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, informasi), sehingga sistem yang terstruktur cenderung terstratifikasi dan menciptakan saling ketergantungan pada unsur lain¹. Penelitian ini mengambil kasus proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 di kabupaten Sidrap.

Anggaran daerah merupakan akumulasi kepentingan setiap aktor yang terlibat dalam penyusunannya. Kepentingan setiap aktor berbeda-beda sehingga dapat memunculkan persaingan dan pertentangan setiap memasukan kepentingannya terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Proses penyusunan APBD merupakan sebuah

¹ Taufik. *Studi jaringan aktor dalam kebijakan publik*. AL-IJTIMA'-International Journal of Government and Social Science. Vol. 2, No. 2, April 2017. Hal 222

proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan (Abdullah dan Asmara, 2006). Hal tersebut membuat setiap aktor membentuk jaringan dan memerlukan strategi bagi aktor untuk dapat mengakses APBD.

Beberapa studi tentang aktor tentang politik anggaran khususnya dinamika penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menyebutkan aktor dominan proses penyusunan APBD adalah aktor formal. Eksekutif dan legislatif melakukan kolaborasi tertutup atau dapat dianalogikan “pekerjaan bisik-bisik”. Hal ini dipengaruhi karena proses penyusunan APBD tidak melibatkan langsung aktor informal terutama masyarakat. Ruang konsultasi publik dalam mengakses APBD terbatas karena aktor formal mementingkan konstituen dan popularitasnya dalam menyusun anggaran daerah (Marno Wance, 2017; Harzon Y. 2011; Achmad Nur Fauzia dan Dwi Rostyaningsih, 2018).

Berbagai studi lain juga menjelaskan terkait pentingnya peran aktor diluar aktor formal melalui jaringan aktor dalam kebijakan publik. Aktor dalam kebijakan publik dikelompokkan jadi dua yaitu aktor formal dan informal (resmi dan tidak resmi) atau aktor negara dan non negara. Peran berbagai aktor sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Setiap aktor memiliki akses yang berbeda sehingga masing-masing aktor membentuk jaringan. Pemerintah sebagai aktor formal tidak menjadi aktor tunggal atau dominan. Keterlibatan aktor informal berperan penting untuk saling berinteraksi, komunikasi, dan Kerjasama demi tercapai

tujuan semua aktor berdasarkan harapan dan kepentingannya masing-masing aktor (taufik, 2017; Alwi, 2012; Pratikno, 2010; Zhou dan Nan, 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan sebagai peraturan daerah. Sedangkan menurut Mardiasmo, Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam setiap periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penyusunan anggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan anggaran². APBD sebagai politik anggaran merupakan bagian dari kebijakan publik, karena dirumuskan dan ditetapkan sebagai wujud komitmen untuk kepentingan publik.

Penyusunan APBD berpedoman kepada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKP) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan negara. Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 181 dan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 17-18, yang menjelaskan bahwa penyusunan APBD harus ditetapkan berdasarkan skala prioritas dan plafon anggaran, rencana keuangan

² Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. Hal 17

daerah, kebijakan umum anggaran daerah yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah³. Salah satu tujuan dibuat anggaran adalah untuk membiayai seluruh belanja rutin pegawai dan kebijakan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu para pemangku kepentingan dalam hal ini aktor politik yang terlibat dalam penyusunan anggaran harus memahami tujuan politik anggaran secara substansial dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di kabupaten Sidrap proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melibatkan aktor politik berdasarkan latar belakang masing-masing aktor. Terkait anggaran daerah, selain kedudukannya sebagai kepala eksekutif, kepala daerah memegang kekuasaan terkait pengambilan keputusan terhadap APBD. Kepala daerah di kabupaten Sidrap adalah Dolla Mando dan wakil bupati Mahmud Yusuf setelah mengalahkan istri bupati dua periode sebelumnya yaitu Fatmawati Rusdi dan Abdul Madjid pada pilkada 2018. Bupati Sidrap Dolla Mando periode 2018-2023 sebelumnya sebagai wakil bupati dua periode mendampingi suami Fatmawati Rusdi yaitu Rusdi Masse. Sehingga pengaruh persaingan antara pendukung bupati sebelumnya yaitu Rusdi Masse dengan bupati

³ Lembaga kajian nasional dan otda. *Penyusunan APBD tahun 2022*. Diakses di <https://lkn-otd.com/penyusunan-apbd-tahun-2022-detail-408165.html>, pada tanggal 4 juli 2022 pukul 20.24 WITA.

terpilih Dolla Mando masih berpengaruh dalam politik anggaran daerah di kabupaten Sidrap.

Di lingkup legislatif dari delapan fraksi hanya fraksi Nasdem yang berposisi dalam pemerintahan, fraksi tersebut lebih berani dan konsisten mengkritik setiap kebijakan pemerintah. Jika dilihat pada pilkada 2018 partai pengusung bupati hanya 2 partai yaitu partai gerindra dan demokrat, Mayoritas partai mengusung pasangan Fatmawati Rusdi. Hal tersebut akan menimbulkan hubungan timbal balik berupa pertukaran kepentingan antara aktor yang didukung dengan aktor pendukung.

Sebelum masuk ke tahap pembahasan bersama antara eksekutif dengan legislatif,terkait penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD menjadi APBD kemudian dijabarkan ke dalam peraturan daerah dan peraturan bupati di bentuk tim khusus perencanaan dan penyusunan rancangan APBD. Tim tersebut terdiri atas dua yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar). TAPD terdiri dari sekretaris daerah sebagai ketua tim dan anggota-anggotanya yaitu Kepala Badan Keaungan Daerah dan Aset Daerah, Badan pembangunan Daerah, dan kepala bidang perencanaan anggaran. Sedangkan dari tim badan anggaran terdiri dari masing-masing dua orang dari 8 fraksi yang ada dalam DPRD kabupaten Sidrap. Aktor formal dari kedua Lembaga tersebut merupakan aktor yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran dan melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam anggaran daerah. Aktor yang

memiliki kepentingan dapat juga melakukan lobi atau negosiasi terhadap tim ini untuk memasukan kepentingannya terhadap APBD.

Persaingan dua kelompok yang mendominasi dinamika politik kabupaten Sidrap yaitu orang-orang bupati saat ini dengan orang-orang bupati sebelumnya masih berpengaruh seperti yang terjadi pada perbedaan pandangan antara DPRD dan pemerintah daerah terkait beberapa Permasalahan di kabupaten Sidrap termasuk dalam hal perubahan APBD tahun 2021. Fraksi sidrap hebat yang terdiri dari partai PDIP, PKPI, dan Perindo Masuk mendukung pemerintah daerah Ketika anggota DPRD menggunakan hak interpelasinya. Selisih suara antara anggota DPR yang ingin mengeluarkan dan menolak hak interpelasi adalah 3 orang. Hal ini menggambarkan bahwa komposisi kekuatan politik di lembaga DPRD Sidrap yang mendukung pemerintah daerah adalah sama kuat atauimbang. Akan tetapi partai politik yang tidak mendukung tersebut bukan berarti tidak ikut serta dalam menjalankan pemerintahan daerah, apalagi memperjuangkan hak rakyat akan tetapi sebagai bentuk perbedaan kepentingan antara aktor dan partai.

Selain terkait proses terpilihnya bupati Sidrap dan latar belakang aktor pada lembaga legislatif. Terdapat juga faktor lain yang dapat mempengaruhi persaingan aktor dalam mendominasi anggaran daerah yaitu keterbatasan anggaran publik sebagai alokasi sumber daya. Perbandingan anggaran publik dengan kepentingan aktor berbeda jauh, anggaran terbatas sementara kepentingan aktor tidak terbatas atau

berbanding terbalik. Kepentingan beberapa aktor berbeda-beda, hal ini dapat menambah rumitnya pembagian dan pemenuhan setiap kepentingan aktor. Pada dasarnya lembaga legislatif memperjuangkan konstituen berdasarkan daerah pemilihannya untuk meningkatkan kepercayaan publik, sedangkan eksekutif membiayai segala kebutuhan SKPD, aspirasi rakyat dari hasil musrenbang dan visi misi kepala daerah.

Salah satu penyebab kelangkaan dan keterbatasan anggaran publik di kabupaten Sidrap adalah akumulasi utang pemerintah daerah yang dapat menjadi beban terhadap APBD. kewajiban utang pemerintah daerah kab. Sidrap sebesar Rp 352 miliar lebih dari tahun 2017 dan akan berakhir hingga 2025, Pembayaran utang ini dibebankan kepada APBD setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah⁴. Menurut Bupati Sidenreng Rappang hingga akhir 2020 utang sisa kewajiban utang sebesar Rp 154 miliar lebih atau telah terbayar sebesar Rp 198 miliar lebih.

Selain itu terdapat item dalam anggaran daerah yang memiliki porsi pengeluaran yang tinggi. Berdasarkan APBD perubahan 2021 belanja operasional masih memiliki porsi paling tinggi sebagai beban APBD sebesar 67.58%. belanja operasional ini meliputi berbagai kebutuhan jangka pendek Bupati, wakil bupati, pimpinan DPRD, anggota DPRD, Aparatur sipil negara (PNS dan PPPK), dan honorarium. Menurut Peraturan

⁴ Ade Cahyadi, *Sidrap Tiap Tahun Anggarkan Rp 30 Miliar Bayar Utang Ke Rekanan Dan Bank Dunia*, pare pos, pare-pare, 2021. (<https://parepos.co.id/2021/09/sidrap-tiap-tahun-anggarkan-rp-30-miliar-bayar-utang-ke-rekanan-dan-bank-dunia/> Diakses pada tanggal 18 Januari 2022 Pukul 15.34 WITA).

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2022 yang dimaksud belanja operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek⁵. Jenis belanja operasi yang memiliki porsi besar dalam APBD adalah belanja pegawai. Belanja ini digunakan untuk menggerakkan kompensasi yang diberikan kepada perangkat pemerintah daerah dan DPRD yakni ASN (PNS dan PPPK) dan Honorarium yang telah dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran tersebut menjadi sumber daya terbatas sehingga memunculkan persaingan antar aktor. Sehingga Sumber daya yang terbatas akan menciptakan koalisi dan oposisi.

Jika dicermati lebih lanjut berdasarkan tujuan disusunnya APBD adalah untuk kepentingan masyarakat banyak seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan petani sebagai kabupaten penghasil beras, dan program kerja lainnya yang menyentuh langsung masyarakat, akan tetapi porsi belanja operasional masih sangat tinggi sebesar 67,58 dari persentase belanja. Berikut uraian APBD perubahan 2021 pada tabel 1.1

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Tabel 1.1 : RINGKASAN PERUBAHAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	128.480.478.000
4.1.01	Pajak Daerah	35.963.880.000
4.1.02	Retribusi Daerah	22.142.598.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	65.374.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.045.073.004.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	988.561.164.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	56.511.840.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	52.449.167.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	14.686.567.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37.762.600.000
	Jumlah Pendapatan	1.226.002.649.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	863.588.988.566
5.1.01	Belanja Pegawai	540.730.972.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.480.558.189
5.1.03	Belanja Bunga	1.200.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	74.041.807.577
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	135.650.000
5.2	BELANJA MODAL	230.124.151.434
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.500.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.348.642.634
Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.686.277.800
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.487.231.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	102.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000

5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	142.874.466.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.966.114.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	137.908.352.000
	Jumlah Belanja	1.241.587.606.000
	Total Surplus/(Defisit)	(15.584.957.000)
Kode	Uraian	Jumlah
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	18.084.957.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18.084.957.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	18.084.957.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000
	Pembiayaan Netto	15.584.957.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0
	TOTAL APBD	1.244.087.606.000

(Sumber : <https://sidenrenggrappangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/ringkasan/2021/apbd/360/0>, diakses pada tanggal 18 Desember 2021 pukul 13.45 WITA)

Penyusunan anggaran daerah dapat menjadi arena terjadinya proses tawar menawar antar aktor dalam mengakomodasi setiap kepentingannya, karena anggaran sebagai sumber daya terbatas. Kepentingan aktor formal dalam hal ini lembaga legislatif dan eksekutif masing-masing membutuhkan anggaran besar. Eksekutif membutuhkan belanja operasional setiap SKPD dan instansi lainnya begitu juga pihak legislatif membutuhkan anggaran untuk membiayai pokok pikiran setiap anggota dewan (pokir) berdasarkan hasil reses atau kepentingan konstituen daerah pemilihannya.

Pokok-pokok pikiran atau pikir anggota DPRD merupakan aspirasi rakyat berdasarkan reses setiap anggota DPRD di setiap daerah pemilihannya. Sehingga setiap anggota DPRD akan memperjuangkan masing-masing konstituennya dan mengadvokasi setiap kepentingannya. Sementara dari pihak eksekutif melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) sebagai langkah dalam mengambil program berdasarkan aspirasi rakyat sama halnya reses yang dilakukan oleh DPRD. Kemudian Bupati terpilih juga memiliki visi misi tersendiri. sehingga prioritas pembangunan dari visi misi bupati butuh akomodasi terhadap APBD. musrenbang dan visi misi Bupati akan menjadi program kerja berdasarkan tugas fungsi setiap perangkat daerah dari pihak eksekutif. Hasil musrenbang dari pihak eksekutif dan pikir dari pihak anggota DPRD merupakan dua hal yang dapat memunculkan irisan hingga pertentangan kepentingan setiap aktor.

Dinamika politik anggaran kadang muncul fenomena *brokery* dimana kepentingan setiap substantial setiap aktor yang terlibat nyata akan menyisipkan kepentingan terselubung bagi dirinya sendiri maupun pesanan (*by Order*) dari aktor eksternal atau informal⁶. Di Kabupaten Sidrap Setiap program kerja sebagai kepentingan terdapat aktor individu yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan selain kepala daerah untuk mengakomodir kepentingan aktor lain terhadap APBD. Hal ini telah menjadi

⁶ Putri Rezidento Haneda, *Dinamika penyusunan anggaran daerah : kasus proses penetapan program dan alokasi anggaran belanja daerah di kabupaten sleman*, 2010, hal 74

rahasia umum ditengah-tengah masyarakat. Selain itu terdapat fenomena yang menarik di kabupaten Sidrap yaitu setiap program kerja atau rencana proyek yang diusulkan oleh aktor formal, maka aktor itu sendiri akan meminta kembali sebagai pelaksana atau yang akan mengerjakan proyek tersebut. adapun muncul pihak ketiga, pihak ketiga tersebut juga tidak terlepas dari relasi aktor. jadi yang terjadi adalah terdapat proses permintaan dan pemberian (*given*).

Selain pengaruh aktor formal terdapat juga pengaruh dari pihak eksternal yaitu Aktor informal. Aktor informal adalah aktor selain aktor formal yang memiliki pengaruh terhadap besarnya anggaran dan program kerja yang masuk ke dalam APBD. Aktor informal dapat berupa individu maupun kelompok. Keterlibatan aktor informal berada di balik aktor aktor formal. Aktor ini memiliki akses terhadap APBD melalui jalur-jalur nonformal berupa titipan terhadap pemangku kebijakan.

Aktor informal juga memiliki kepentingan dalam APBD melalui titipan dan permintaan (*by order*) dengan menggunakan komunikasi politik secara formal dan informal dengan aktor yang memiliki kewenangan secara hukum. Aktor informal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok kepentingan yang tidak memiliki jabatan di eksekutif maupun di legislatif. Kelompok kepentingan tersebut memiliki modal sosial yang kuat dengan relasi atau pendekatan secara sosiologis berdasarkan hubungan kekeluargaan, atau hubungan kerja. Yang lebih menarik di Kabupaten Sidrap terdapat aktor individu yang memiliki peran kuat dalam menyetujui

(disposisi) program kerja aktor lain. Maka dari itu pada pembahasan selanjutnya, penulis akan menganalisis lebih lanjut bagaimana relasi aktor dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan analisis fenomena politik diatas terkait proses penyusunan anggaran APBD Sidrap tahun 2022, maka dari itu penulis tertarik mengkaji dan memahami relasi aktor dan strategi aktor dalam memasukan serta mengawal kepentingannya dalam penyusunan APBD 2022 dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul **“Politik Anggaran: Relasi Aktor Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2022”**

1.2 Rumusan masalah:

Berdasarkan latar belakang, maka penulis membatasi rumusan masalah tersebut, sebagai berikut:

1. Bagaimana terbentuknya jaringan aktor dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sidrap tahun 2022 ?
2. Bagaimana strategi aktor politik memasukan dan mengawal kepentingannya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sidrap tahun 2022 ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan terkait dinamika relasi aktor penyusunan anggaran APBD Kab. Sidrap yang diangkat diatas, Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan Terbentuknya Jaringan Aktor Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sidrap tahun 2022.
2. Mengkaji Strategi Aktor Politik Memasukan Dan Mengawal Kepentingannya Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sidrap tahun 2022.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat teoritis, mengungkapkan secara ilmiah terkait dominasi aktor, relasi aktor atau jaringan antar aktor politik dalam penyusunan anggaran, dan mengetahui proses aktor dalam memasukan dan mengawal kepentingannya dalam penyusunan politik anggaran daerah. Dalam ranah akademik akan memperkaya khasanah kajian ilmu politik khususnya pengembangan kajian ilmu politik kontemporer.

Manfaat praktis, Sebagai bahan informasi dan rujukan untuk penelitian lain dalam mengembangkan, dan menelaah, kajian politik kontemporer terkait politik anggaran. Selain itu sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan dan memahami Kembali substansi APBD dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pendekatan, teori, dan konsep yang digunakan dalam menganalisis relasi aktor politik dalam penyusunan APBD Kab. Sidrap 2022 untuk selanjutnya menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini. Bab ini juga dijelaskan politik anggaran sebagai pendekatan atau perspektif, jaringan aktor sebagai teori, dan menguraikan penelitian terdahulu (*literatur review*).

2.1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dalam Perspektif Politik Anggaran

Secara konseptual, anggaran merupakan instrumen penting kebijakan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah dan menggambarkan pernyataan komprehensif tentang prioritas negara⁷. Sementara itu, dalam bukunya, Irene S. Rubin, seorang pakar politik anggaran, mengemukakan bahwa, dari perspektif politik, anggaran merupakan : (1) *Budget reflects "choices about what government will and will not do"*; (2) *Budget reflects the priorities of a government as the "budget process mediates between groups and individuals who want different things from government..."*⁸. Sedangkan Denhardt dan Denhardt di dalam bukunya menjelaskan bahwa : "*budgets*

⁷ 64 Yuna Farhan, Menelaah Arah Politik Anggaran di Indonesia, melalui : http://www.psikindonesia.org/files_pdf/%5BFITRA%5D%20Menelaah%20arab%20Politik%20Anggaran%20di%20Indonesia_20100330_170322. diakses tanggal 30 Juni 2022

⁸ Irene S. Rubin, *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*, Chatham House: Chatham, 2006, Hal 1-2

express the public policy choices of governments and others, among these are choice respect to the impact of the public sector on the economy”⁹.

Jadi jelaslah bahwa, Anggaran menjelaskan apa yang pemerintah lakukan dengan mengalokasikan sumber daya terbatas, menyiratkan pilihan di antara berbagai macam pengeluaran yang potensial untuk pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik dan menyiratkan keseimbangan, serta membutuhkan beberapa macam proses pembuatan keputusannya¹⁰.

Dalam organisasi Pemerintah daerah, penganggaran merupakan suatu tahapan yang rumit dengan rentang waktu yang panjang dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Sehingga, sepanjang proses perumusannya melibatkan berbagai aktor, mulai dari perencanaan dan penyusunan di lingkungan eksekutif, sampai pengesahannya di legislatif daerah. Tidak mengherankan, banyak pihak menilai anggaran sebagai proses politik arena perebutan sumber daya publik antara berbagai kepentingan, baik aktor-aktor di dalam lingkaran sistem politik yang berlaku maupun kelompok kepentingan lain yang memiliki pengaruh terhadap keputusan politik anggaran. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Wildavsky, bahwa *“budgeting is a subsystem of politics, not vise versa -*

⁹ Robert B. Denhardt And Janet V. Denhardt, *Public Administration: An Action Orientation*, 6th Ed. Thomson Wadsworth.USA. 2009. Hal 238.

¹⁰ Herzon. Y, *Politik Anggaran: Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja Langsung Skpd Dalam Penyusunan APBD Tahun 2011 Di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi*, Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011, Hal 24.

because of the current tendency to overload budgeting” (penganggaran adalah subsistem dari politik, bukan sebaliknya, karena kecenderungan yang ada saat ini untuk membebani anggaran)¹¹.

Politik anggaran dapat dipahami dengan penyelidikan atas pola perilaku dan kewenangan. Hal tersebut merupakan pintu manifestasi dari distribusi kekuasaan para aktor dalam pembuatan kebijakan anggaran. Sehingga dapat dimengerti bahwa tarik-menarik antar aktor-aktor utama dalam penganggaran, tidak terlepas dari keinginan untuk memperbesar pengaruhnya masing-masing, sebagaimana terlihat dari terakomodasinya kepentingan aktor. Untuk memahami proses penyusunan anggaran diperlukan pemahaman tentang¹² a). Struktur formal peran dan tanggung jawab dalam proses penganggaran, b). Peran Pemerintah dalam pengambilan keputusan, pilihan politik dan akuntabilitas pada sistem manajemen pengeluaran publik, c). Jaringan kekuasaan dan pengaruh stakeholders (di luar proses formal) yang mempengaruhi hasil dari proses anggaran, d). Insentif yang diberikan (baik tersembunyi maupun terang-terangan) atas tindakan yang mempengaruhi politisi dan birokrasi dalam pengambilan keputusan selama penyusunan dan penetapan anggaran, e). Ruang pengambilan keputusan birokrasi pada semua level proses penetapan anggaran.

¹¹ Aaron Wildavsky, *The New Politics Of The Budgetary Process*, 2nd Edition, New York: Harper Collins, Hal. 439.

¹² Andy Norton and Diane Elson, *What's behind the budget? Politics, Right and accountability in the budget process*, Overseas Development Institute, 2002, Hal.23, seperti dikutip oleh Abdul Waidl, dkk , *Ibid*, Hal. 117.

Dengan konteks inilah, anggaran publik yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memegang peranan penting sebagai salah satu instrumen kebijakan dalam merealisasikan tujuan yang telah ditentukan. APBD dalam perspektif politik anggaran pada kajian ini adalah pengalokasi sumber daya terbatas dalam membiayai program kerja yang telah disusun dalam satu tahun periode anggaran dengan melihat peran, dan pola perilaku aktor yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran daerah sehingga dapat membentuk jaringan dan Menyusun startegi dalam memasukan kepentingannya terhadap APBD.

2.2. Jaringan Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai tujuan eksplisit¹³. Kebijakan publik dirumuskan dan dibuat berdasarkan tuntutan dan dukungan dari masyarakat yang dibuat oleh organ-organ pemerintah dan para aktor di dalamnya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Samodra Wibawa (2010:1) mengemukakan bahwa, kebijakan publik adalah keputusan suatu sistem politik untuk/ dalam/ guna mengelola suatu masalah atau memenuhi suatu kepentingan, dimana pelaksanaan keputusan tersebut membutuhkan dikerahkannya sumber daya milik sistem

¹³ Herzon. Y, *Politik Anggaran : Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja Langsung Skpd Dalam Penyusunan Apbd Tahun 2011 Di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi*, Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2011, Hal 14.

politik tersebut¹⁴. Jadi, dari definisi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah, yang didukung oleh aktor politik dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi masalah publik.

Kebijakan publik sejatinya ada untuk dapat memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Terdapat tiga proses dalam kebijakan publik yaitu: merumuskan suatu kebijakan, menerapkan suatu kebijakan, dan mengevaluasi suatu kebijakan yang sudah berjalan¹⁵. Intisari dari ketiga proses di atas berfokus pada realisasi atau tindakan dari aktor politik dalam suatu permasalahan yang terjadi. Realisasi tersebut disebutkan Dye (1978) berbentuk dua pilihan: yakni pemerintah yang memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu¹⁶. Di dalam kebijakan publik yang dibuat, pemerintah selaku aparatur negara (government) memiliki wewenang untuk mengalokasikan nilai-nilai yang bersifat otoritatif kepada masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut diwujudkan dalam Tindakan mengelola, mengalokasikan, hingga mendistribusikan berbagai nilai dan sumberdaya publik (governance)¹⁷.

¹⁴ Samodra Wibawa, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal. 1

¹⁵ Nugroho, R. D. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Gramed. 2004.

¹⁶ Dye, T. R. *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall, Englewood Cli. 1978. Seperti Dikutip Oleh Jacko Ryan. *Peranan Jaringan Aktor Dalam Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Indonesia*. Departemen Ilmu Politik, Universitas Airlangga. 2020. Hal. 492

¹⁷ Suharto, E. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) di Indonesia*. Alfabeta. 2008.

Tahap Perumusan kebijakan publik merupakan inti dari kebijakan publik dan merupakan proses yang rumit. Sebab didalamnya mencakup pertanyaan bagaimana masalah-masalah timbul dan masuk ke dalam agenda Pemerintah, siapa dan bagaimana merumuskan masalah tersebut untuk mengambil Tindakan. Kemudian sikap apa yang diambil oleh lembaga legislatif atau lembaga lainnya, selanjutnya bagaimana para pemimpin menerapkan kebijakan tersebut dan akhirnya, bagaimana kebijakan tersebut dievaluasi¹⁸.

Perumusan kebijakan adalah salah satu tahap penting dalam pembuatan sebuah kebijakan publik. Karena tahap ini sangat menentukan bagaimana permasalahan publik dapat diserap oleh *decision making* dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Seperti yang ditulis oleh Charles Lindblom dalam bukunya "*The Policy Making Process*" dan beberapa para ahli yang lain, bahwa dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat atau pemeran dalam proses kebijakan tersebut¹⁹.

Aktor dalam kebijakan publik adalah orang-orang maupun kelompok-kelompok yang terlibat dalam suatu proses kebijakan publik dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Keterlibatan aktor dalam perumusan kebijakan publik akan menentukan seperti apakah kebijakan publik tersebut

¹⁸ Budi Winarto. *Kebijakan Publik : Teori dan proses*. Media Pressindo, Yogyakarta. 2008

¹⁹ Taufik. *Studi jaringan aktor dalam kebijakan publik*. AL-IJTIMA'-International Journal of Government and Social Science. Vol. 2, No. 2, April 2017. Hal 220.

akan dirumuskan, bagaimana masalah publik didefinisikan dan pada akhirnya bagaimana kebijakan publik tersebut dirumuskan. Sehingga para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika tahap-tahap proses kebijakan.

Menurut Moore (2014:187), secara umum aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, yaitu aktor state, aktor private, dan aktor masyarakat (civil society). Ketiga faktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik. aktor kebijakan juga dapat dikelompok menjadi dua yaitu aktor yang berasal dari aktor negara (Resmi) dan aktor non negara (informal) atau dapat disebut sebagai pembuat kebijakan resmi (*official policy-makers*) dan peserta non resmi (*nongovernmental participants*).

Aktor sebagai pilar terdepan yang mengimplementasikan kebijakan publik sejatinya membutuhkan dukungan politik, legitimasi, informasi, dan partner koalisi. Sementara itu di saat yang sama kelompok-kelompok kepentingan memiliki hasrat akan akses terhadap proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Perbedaan akan kebutuhan inilah yang melatar belakangi terjadinya pertukaran (*exchange*) dan transaksi (*transaction*). Pertukaran ataupun transaksi adalah instrumen yang hadir dalam proses formulasi kebijakan berbasis jaringan. Proses ini kemudian mewarnai interaksi antar aktor-aktor yang terlibat. Dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh aktor-aktor yang berbeda latar belakang,

maka informasi, preferensi dan pengetahuan akan masalah kebijakan yang ingin dipecahkan dapat menjadi lebih jernih.

Roberts et al. (2004:78) memberikan pandangan untuk mengamati perilaku aktor yang mungkin berusaha untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan melalui strategi politik. Melalui kerangka strategi politik, Roberts et al. (2004:78) menguraikan empat tipologi yang digunakan oleh aktor untuk mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Kerangka ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menyelidiki perilaku pemangku kepentingan sehingga terlihat tujuan dari tindakan tersebut. (1) Strategi posisi melibatkan tawar-menawar dengan aktor lain yang terlibat dalam proses kebijakan untuk mengubah posisi mereka. 'Posisi' ini mengacu kepada dukungan atau penentangan seseorang terhadap kebijakan yang diminati. (2) Strategi kekuasaan berusaha untuk mengubah kekuasaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dalam seorang aktor. (3) Strategi pemain berusaha untuk memobilisasi aktor yang tidak dimobilisasi, yang dapat membantu, dan mendemobilisasikan aktor yang merupakan ancaman. Terakhir, (4) strategi persepsi yang berusaha mengubah cara berpikir dan cara aktor lain memetakan masalah dan solusi.

Selama proses perumusan kebijakan, para pembuat kebijakan harus mengembangkan tujuan dan cara untuk memecahkan masalah serta menentukan alternatif kebijakan yang dapat diambil (Jann dan Wegrich,

2006; Fawzi, 2018:1137). Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya keterlibatan antara aktor, melalui jaringan. Jejaring kebijakan memberi kontribusi terhadap perubahan tujuan dengan kemunculan aktor-aktor yang sarat dengan nilai-nilai motivasi dan kepentingan²⁰.

Katzenstein menggunakan konsep jaringan sebagai karakteristik umum hubungan antara sektor publik dan private dalam implementasi kebijakan, sementara Lehmbuch (1984), menggunakan istilah *network* untuk menghubungkan pihak-pihak ke arah pemusatan korporasi. Berbagai preferensi ahli yang menjadi landasan digunakannya istilah jaringan, maka disimpulkan bahwa konsep jaringan berfokus pada hubungan antara negara dan non-negara (*industry, NGO, interest group, CSO*) dan pola hubungan tersebut didasarkan pada interdependensi atau saling ketergantungan

Teori jaringan didasarkan pada asumsi bahwa relasi para aktor itu bersifat saling tergantung satu sama lain (*interdependence*). Dalam makna yang lebih operasional, bisa dimengerti para aktor tidak bakal mampu mencapai tujuan tujuannya tanpa menggunakan sumber daya-sumber daya yang dimiliki oleh aktor lain²¹. Asumsi kedua adalah terdapat suatu elemen yang heterogen. Setiap aktor dipandang memiliki cara dan akses yang

²⁰ Sri Suwiti. *Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang)*. Jurnal Delegasi STIA Banjarmasin Vol. VI NO. 3, Januari 2008. Terakreditasi KepDirjen Dikti No. 56/Dikti/Kep/2005.

²¹ Pratikno. *Peningkatan Kapasitas Berjejaring Dalam Tata Pemerintahan Yang Demokratis, dalam Wahyudi, Kumorotomo, dan Ambar, Widaningrum. Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*. Gava Media: Yogyakarta. 2010. Hal. 114.

beragam dalam mendapatkan sumber daya dan memiliki kemampuan untuk koordinasi, kolaborasi dan menciptakan efek (Alcadipani & Hassard, 2010). Karenanya, aktor dalam kebijakan publik tidak bersifat tunggal namun plural. Jaringan akan tercipta melalui pemerintah dan berbagai lapisan yang terdapat di masyarakat sehingga didapatkan kontribusi yang maksimal. yang terhimpun dalam jaringan bisa terdiri dari individu maupun kelompok yang aktif dan saling mempengaruhi.

Keragaman dari aktor yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran berbeda dan seringkali beradu motivasi, tujuan, dan kepentingan. eksekutif berkepentingan memperluas cakupan institusinya dan memperbesar budget bagi pelaksanaan program dan kegiatannya, sementara legislatif berkepentingan agar dapat terpilih kembali (*reelection*) dengan memperbanyak "*pork barrel*" bagi daerah pemilihannya. Untuk memenuhi hal tersebut, legislators mencari program dan projects yang membuatnya populer di mata konstituen²². Akibat yang muncul kemudian karena masing-masing aktor memperjuangkan kepentingannya, para aktor memungkinkan untuk memisahkan diri (terfragmentasi)²³.

Eksekutif dapat saja terfragmentasi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pro dan kontra. Artinya, pada kelompok eksekutif yang pro

²² Syukriy Abdullah. *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory*. Makalah Disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu. Bengkulu. 4-5 Oktober 2004.

²³ Fadmi Ridwan. *Pengalaman Aceh mengelola kontestasi politik : Studi Kontestasi Birokrat, Politisi dan Ulama dalam proses kebijakan anggaran Dayah Tahun 2008*. Program Studi Ilmu Politik. UGM. 2008.

menginginkan kinerja anggaran, sehingga anggaran dapat dipergunakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disusun berdasarkan Nota kesepakatan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, pada kelompok eksekutif yang kontra, menginginkan maximizing budget bagi institusinya dengan mengabaikan segala ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan harapan bahwa dengan memaksimalkan anggaran, maka semakin banyak pula program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada institusi mereka. Kemudian pada sisi legislatif terjadi juga fragmentasi. Pada sisi politisi yang pro lebih mementingkan jumlah anggaran, sehingga akan semakin banyak proyek-proyek dilaksanakan, pada akhirnya dapat memuaskan konstituen-konstituen mereka di daerah pemilihannya masing-masing. Sementara itu, politisi yang kontra menginginkan agar anggaran dapat terdistribusi secara proporsional dan berkeadilan.

Dari uraian tersebut, Aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran saling terfragmentasi secara internal dan eksternal. Dimana masing-masing mereka yang terfragmentasi memiliki kepentingan untuk mewujudkan tuntutan-tuntutan khususnya. Aktor-aktor akan saling bersatu di sekitar tujuan bersama sehingga terbentuklah koalisi. Koalisi dimaknai sebagai penggabungan kekuatan dengan pihak lain untuk memperkuat posisi tawar menawar dan dapat menjadi strategi yang jitu

untuk mempertahankan eksistensi suatu pihak²⁴. Kesesuaian ideologi dan basis perjuangan para aktor dapat dijadikan sebagai parameter dengan siapa mereka akan berkoalisi. Koalisi dapat juga didefinisikan sebagai dua atau lebih pihak yang setuju untuk mengumpulkan sumber daya mereka untuk mencapai beberapa hasil yang saling menguntungkan.

Disamping munculnya koalisi, tidak tertutup kemungkinan munculnya kompromi-kompromi antar aktor dalam proses penyusunan anggaran. Kompromi dimaknai bahwa Pihak yang berkontestasi walaupun tidak memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lain tetapi mereka tetap membuka kemungkinan untuk berdialog, dan melakukan tawar-menawar, saling memberi dan menerima, menyetujui tujuan yang bersifat menguntungkan kedua belah pihak dan sebagai suatu tindakan “*back up*” apabila upaya kerjasama (kooperatif) tidak berhasil²⁵. Disamping itu suatu kompromi tidak mungkin memuaskan semua pihak yang berkepentingan secara sempurna.

Terkait dengan pembahasan anggaran, kompromi dapat menghasilkan alternatif tawaran, antara lain pemindahan lokasi kegiatan (proyek), pengurangan dan penghapusan suatu kegiatan dan mengganti dengan kegiatan yang baru. Jika masing-masing aktor berusaha menjadi sangat kuat, baik melalui koalisi maupun kompromi, maka pada saat

²⁴ Firmansyah. *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan positioning ideologi politik di era demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2008. Hal. 359.

²⁵ Harbani Pasolong. *Kepemimpinan Birokrasi*. Alfabeta. 2008. Hal. 191

bersamaan kelompok lain akan berupaya untuk melawannya, dan merekapun tersisihkan. Kelompok yang tersisihkan tersebut membangun kerjasama dengan kelompok lain yang tidak puas atau keluar (*exit*) dari arena pembahasan suatu kebijakan

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori jaringan aktor dari Wellman (1983) dalam Ritzer ²⁶. Teori jaringan bersandar pada sekumpulan prinsip yang berkaitan logis. Prinsip itu adalah sebagai berikut:

1. Ikatan antara aktor biasanya adalah simetris baik dalam kadar maupun intensitasnya. Aktor saling memasok dengan sesuatu yang berbeda dan mereka berbuat demikian dengan intensitas yang semakin besar atau semakin. Kecil.
2. Ikatan antara individu harus dianalisis dalam konteks struktur jaringan lebih luas.
3. Terstrukturnya ikatan sosial menimbulkan berbagai jenis jaringan non-acak. Di Satu pihak, jaringan adalah transitif (transitive): bila ada ikatan antara A dan B dan C, ada kemungkinan ada ikatan antara A dan C. Di lain pihak, ada keterbatasan tentang berapa banyak hubungan yang dapat muncul dan seberapa kuat hubungan itu dapat terjadi. Akibatnya adalah ada kemungkinan terbentuknya

²⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Ketujuh (Terjemahan), Kencana Prenada media Group: Jakarta, 2009, Hal. 359.

kelompok-kelompok jaringan dengan batas tertentu, yang saling terpisah satu sama lain.

4. Adanya kelompok jaringan menyebabkan terciptanya hubungan silang antara kelompok jaringan maupun antar individu.
5. Ada ikatan asimetris antara unsur-unsur di dalam sebuah sistem jaringan dengan akibat bahwa sumber daya yang terbatas akan terdistribusikan secara tak merata.
6. Sebagai prinsip. Distribusi yang timpang dari sumber daya yang terbatas itu dengan bekerjasama. Sedangkan kelompok lain bersaing dan memperebutkannya. Jadi teori jaringan berkualitas dinamis dengan struktur sistem akan berubah bersamaan dengan terjadinya pergeseran pola koalisi dan konflik.

Jaringan kebijakan memberikan kemungkinan komunikasi antara aktor yang berbeda secara berkelanjutan²⁷. Kelompok-kelompok ini akan berinteraksi satu dengan kelompok lainnya dalam pembuatan sebuah program pemerintah maupun kebijakan publik. Adanya berbagai aktor yang terlibat di dalamnya. Dalam pendekatan jaringan ini menunjukkan tidak adanya pemerintah sebagai aktor tunggal dalam pembuatan sebuah kebijakan. Adanya distribusi kekuasaan dan relasi antar-aktor yang saling tergantung sama lainnya. Sehingga pada pendekatan ini kekuasaan tidak

²⁷ Coinsidine, Mark, *Public Policy: a Critical Approach*, Prentice Hall, 1995.

dipusatkan pada kelompok aktor negara saja, melainkan distribusi kekuasaan antar-aktor dalam jaringan kebijakan publik.

2.3 Penelitian Terdahulu (*Literatur Review*)

Pengertian penelitian terdahulu Menurut Hasibuan, (Zainal A:2007) adalah berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam *literature review* ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya pada perumusan masalah. Berikut karya ilmiah terlebih dahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Delly Maulana dengan judul “Konflik Dan Sistem Nilai Dalam Proses Penyusunan Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Pemerintahan Daerah Provinsi Banten”. Penelitian ini ingin menganalisis interaksi antara aktor dan sistem nilai dalam proses penyusunan APBD di pemerintah daerah provinsi Banten. Dalam proses penyusunan APBD di pemerintahan daerah provinsi Banten tahun 2018, terdiri dari aktor resmi (eksekutif dan legislatif) dan aktor tidak resmi (Media Massa, Partai Politik, Lsm, Drd, Tokoh Masyarakat). Hasil penelitian ini menunjukkan proses penyusunan APBD tidak lepas dari latar belakang kepentingan dari masing-masing aktor dalam menentukan dan memutuskan anggaran serta program pada proses penyusunan APBD di pemerintah daerah provinsi Banten.

Penelitian Rozidateno Putri Hanida dengan judul “Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah: Kasus Proses Penetapan Program Alokasi Dan Anggaran Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman Kajian ini tentang dinamika penyusunan APBD khususnya dalam proses penetapan program dan alokasi belanja APBD di wilayah Sleman. Terkait aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan anggaran dalam perspektif politik anggaran masih senantiasa memperjuangkan kepentingan sendiri dengan berbagai strategi baik dari pihak eksekutif maupun legislatif.

Selanjutnya penelitian Ratih Nur Pratiwi dengan judul “Politisasi Anggaran Sektor Publik”. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Proses penyusunan dan penetapan anggaran melibatkan beberapa aktor dimana masing-masing aktor memiliki kebutuhan personal yang berbeda-beda. Beberapa aktor melakukan kepentingan dan politisasi anggaran untuk sektor publik. Pejabat daerah sebagai agen dalam penyusunan rancangan anggaran cenderung membuat penetapan anggaran yang merugikan masyarakat. (2) prosedur birokrasi, penuh dengan konten politik, (3) pada tahap pengesahan, panitia anggaran tidak mempertimbangkan uji relevansi, uji urgen, uji efektivitas biaya. Namun perhatian dengan politik yang lebih tinggi (4) DPRD sebagai wakil rakyat tidak memperjuangkan anggaran untuk publik sehingga terjadi politisasi anggaran untuk kepentingan pejabat.

Penelitian keempat, tesis Herzon Y. dengan judul “Politik Anggaran : Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja Langsung

SKPD Dalam Penyusunan APBD Tahun 2011 di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi”. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa, kontestasi dalam pembahasan anggaran belanja langsung dinas pekerjaan umum terjadi karena ketidakseimbangan kepentingan antara aktor legislatif dan eksekutif yang terlibat dalam pembahasannya. Kontestasi yang terjadi antara legislatif (Badan Anggaran Dan Komisi III DPRD) dengan eksekutif (TPAD dan Dinas Pekerjaan Umum) dianalogikan sebagai pekerjaan “bisik-bisik” atau kolaborasi tertutup. Karena secara aktual relasi kedua aktor ini terjadi secara harmoni, menghindari konflik serta saling menjaga kepentingan masing-masing.

Terakhir penelitian kelima, Syarifudin dengan judul penelitian “Konstruksi Kebijakan Anggaran: Aksentuasi Drama Politik Dan Kekuasaan (Studi Kasus Kabupaten Jembrana Bali)”. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk menganalisis bagaimana interaksi politik, kekuasaan dan politik terjadi dalam konstruksi kebijakan anggaran. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjawab siapa menjadi aktor di balik kebijakan anggaran, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka berinteraksi untuk mendramatisasi konstruksi kebijakan.

Penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji dan mengidentifikasi aktor formal yang terlibat dalam penyusunan APBD, belum terlalu jauh menjelaskan relasi setiap aktor dan strategi aktor dalam mengakomodasi kepentingannya terhadap APBD. Maka dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat aktor dominan

yang memiliki peran besar dalam penyusunan APBD di Kabupaten Sidrap 2022 baik di lingkungan formal dan informal. Selanjutnya penelitian ini berfokus pada pembentukan jaringan aktor yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan strategi dan beberapa pendekatan. Selain itu peneliti menganalisis strategi kelompok kepentingan dalam mengawal kepentingannya terhadap aktor yang memiliki peran dominan dalam dinamika penyusunan anggaran daerah. Yang lebih menarik dalam objek penelitian ini adalah kekuatan politik antara partai koalisi dan oposisi pemerintah daerah di Lembaga DPRD seimbang, sementara di lingkup eksekutif perbedaan politik dan kepentingan bupati terpilih dengan rival pendukung bupati sebelumnya masih berpengaruh.

2.4. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur logika sesuai dengan tema penelitian yang akan ditulis. Hal ini berasal dari rumusan masalah yang telah ditentukan kemudian dikaitkan dengan pendekatan, teori dan konsep. Penyusunan APBD merupakan arena kontestasi politik karena banyaknya keterlibatan aktor baik formal maupun aktor informal, sehingga dapat memunculkan dinamika Tarik menarik kepentingan. kemungkinan terjadinya manipulasi, dominasi, pemangkasan, pengambilan keputusan secara tertutup, dan praktik buruk lainnya terkait dengan anggaran tidak dapat dihindarkan.

Berdasarkan perspektif politik anggaran APBD merupakan kebijakan yang diekspresikan melalui proses anggaran. Pemerintah daerah Bersama

DPRD mengesahkan dan menetapkan APBD sebagai alokasikan sumber daya setelah mengkonversi program-program kerja yang akan dijalankan dengan uang publik. Dalam penyusunannya Anggaran publik merupakan representasi dari berbagai kepentingan aktor berdasarkan relasi atau jaringan aktor. Asumsinya adalah relasi para aktor itu bersifat saling tergantung satu sama lain (*interdependence*). Sehingga para aktor akan membangun relasi dan memperkuat relasinya untuk mempermudah dalam menjalankan komunikasi dan mengadvokasi kepentingan aktor. APBD sebagai anggaran terbatas atau sumber daya terbatas menjadi arena persaingan antara aktor. Maka penelitian ini melihat siapa aktor dominan di lingkungan formal maupun informal dalam penyusunan anggaran daerah, bagaimana terbentuknya jaringan aktor dan strategi aktor dalam memasukan dan mengawal kepentingannya terhadap APBD di kabupaten Sidrap.

2.5. Skema Penelitian

